

TIAP OPD DIPASANG PRASASTI KORPRI REBORN

Unsur Pelayanan Tonggak Kinerja ASN

YOGYA (KR) - Perayaan HUT ke 77 Pemkot Yogya yang jatuh pada 7 Juni 2024 mendatang harus menjadi momentum peningkatan kinerja bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN). Terutama dalam memperkokoh unsur pelayanan sebagai tonggak kinerja yang dibalut melalui organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Yogya yang juga Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, mengapresiasi dan berterima kasih kepada anggota Korpri Kota Yogya yang selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Kontribusi Korpri Kota Yogya sangat mendukung tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance di Kota Yogya sampai saat ini," ujarnya di sela

pemasangan prasasti Korpri Reborn di kompleks Balaikota Yogya, Selasa (4/6). Pemasangan prasasti Korpri Reborn diawali di empat organisasi perangkat daerah (OPD). Masing-masing di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDSDM), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) serta Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (DPKUKM) Kota Yogya. Ke depan seluruh OPD juga bakal dipasang prasasti serupa sebagai penanda organisasi sekaligus mengingatkan kewajiban setiap abdi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aman menilai pada momen ini menjadi penanda penting bagi perjalanan Korpri Kota Yogya dalam mewujudkan komitmen organisasi yang profesional, modern dan berintegritas. "Ini merupakan suatu bentuk kebanggaan kita menjadi bagian dari Korpri Kota Yogya. Di mana Korpri Kota Yogya ini menjadi wadah pembinaan para ASN di luar karir masing-masing mereka," jelasnya. Oleh karena itu dirinya mengajak kepada seluruh anggota ASN Pemkot Yogya untuk turut

memiliki semangat Korpri Reborn, kemudian berkontribusi serta menguatkan jiwa korsa organisasi. "Korpri Reborn bukan hanya sebuah organisasi, tetapi juga sebuah keluarga besar yang harus kita jaga dan pelihara bersama," ujarnya. Dirinya juga berharap dengan jumlah sumber daya manusia Korpri Kota Yogya yang saat ini kurang lebih sebanyak 5.400 orang ASN dapat dikelola dengan baik. "Harapannya Kopri Kota Yogya dapat mengikat tali persaudaraan agar lebih kuat di lingkup masing-masing unit. Sehingga dengan kolaborasi yang baik ini akan berefek terhadap peningkatan kinerja dalam pelayanan di Pemerintah Kota Yogya," ungkapnya. **(Dhi)-f**

KAJATI DIY PAMIT GUBERNUR DIY Sultan Berharap Ada Transfer Pengetahuan TKD

YOGYA (KR) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Ponco Hartanto bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Selasa (4/6). Dalam pertemuan tersebut Sultan berharap Ponco Hartanto dapat mentransfer pengetahuan mengenai Tanah Kas Desa (TKD) kepada Kajati DIY yang baru. "Ngarsa Dalem sempat titip pesan, walaupun kami mendapat promosi ke Jawa Tengah, tapi kami diharapkan tetap bisa terus bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Pemda DIY. Khususnya yang berkaitan dengan kesinambungan penanganan TKD, kami juga diharapkan bisa mentransfer pengetahuan tentang TKD kepada Kajati yang baru," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Ponco Hartanto seusai bertemu dengan Sri Sultan HB X. Menurut Ponco, Sultan mengapresiasi terhadap koordinasi dan kolaborasi dengan Pemda DIY yang selama ini terjalin. Sultan berpesan agar dirinya (Ponco) bisa selalu menjaga amanah di tempat yang baru nanti. Rencananya serah terima jabatan (Sertijab) kepada Kajati DIY yang baru akan dilaksanakan pada 11 Juni 2024 mendatang. Setelah berpamitan dengan Sultan, Ponco bertemu dengan Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Wagub DIY mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ponco selama kurang lebih 15 bulan di DIY. "Semoga semua urusannya di tempat baru lancar dan kalau bisa segera promosi jabatan," ujarnya. Kepada Sri Paku Alam X, Ponco menuturkan, penanganan mafia TKD masih menjadi PR untuk Kajati DIY yang baru nantinya. Ponco berharap Kajati DIY yang baru dapat bekerja sama dengan baik bersama Pemda DIY untuk menyelamatkan aset-aset yang ada. Sebagai informasi, Ponco dimutasi menjadi Kajati Jawa Tengah menggantikan I Made Suarnawan. Sedangkan Kajati DIY yang baru ialah Ahelya Abustaman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kajati Banten. **(Ria)-f**

Gandeng Lembaga Penyiaran KPID DIY Dukung Penuh Pencegahan ODHA

YOGYA (KR) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY memiliki perhatian mendalam serta tanggung jawab moral untuk turut serta menekan laju Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), khususnya pada difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan ibu rumah tangga (IRT). Hal tersebut selaras dengan semangat yang digalakkan Pemda DIY terkait ODHA pada masyarakat kriteria tersebut. "Kami sangat mendukung upaya Pemda DIY melakukan

mitigasi ODHA pada kelompok disabilitas, ODGJ dan IRT," ucap Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY, Febriyanto, Selasa (4/6). Ditambahkan, upaya mitigasi tepat yang dapat ditempuh KPID DIY dengan mamaksimalkan peran serta fungsi Lembaga Penyiaran (LP), baik radio maupun televisi yang bersiaran di DIY. Hal tersebut sesuai dengan tupoksi utama KPID DIY, yakni melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap LP yang bersiaran di

wilayah DIY. "Tentu harapannya, ketika informasi, sosialisasi maupun kampanye terkait ODHA bisa masif dilakukan media penyiaran, akan memudahkan komunikasi ke masyarakat. Sebab penyiaran dapat menjangkau lapisan masyarakat paling bawah karena sifatnya yang universal," sambungnya. Selain itu, KPID DIY juga siap menggandeng mitra-mitra strategis untuk dapat memproduksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terkait dengan ODHA di

kalangan disabilitas, ODGJ dan IRT yang selanjutnya ditayangkan melalui media penyiaran. Sehingga dampaknya makin efektif di masyarakat. "Media masih dipandang mampu membentuk stigma yang kuat di masyarakat. Sehingga penggunaan media penyiaran sangat efektif. Selain itu kami juga mendorong LP di DIY untuk aktif membuat ILM maupun program siaran lain guna sosialisasi ODHA di kalangan khusus tersebut," ungkapnya. **(Feb)-f**

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG						
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, hak atas Tanah, satuan rumah susun dan Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :						
No	Pemohon	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	No Berkas
1	MUCHLIS NURHIDAYAT	112811111.01086	MUCHLIS NURHIDAYAT	Desa Lengkong Rt 03/04 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara	10/08/2017	22074/2024
2	MUCHLIS NURHIDAYAT	112811111.01085	MUCHLIS NURHIDAYAT	Desa Lengkong Rt 03/04 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara	10/08/2017	22073/2024
3	MUCHLIS NURHIDAYAT	112811111.00151	BARATI binti SUHARTO	Desa Lengkong Rt 03/01 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara	20/05/1981	22075/2024

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Banjarnegara, 07 Mei 2024
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
Ttd
NURDIN KAREPESINA, S.SIT.
NIP. 19670616 199103 1 004

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

KEMBALI BENTUK PANSUS PEMBAHAS RAPERDA

Beban Legislasi Anggota Dewan Terpilih Lebih Ringan



Anggota DPRD Kota Yogyakarta mengikuti sidang paripurna.



Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta menandatangani surat keputusan.



Anggota DPRD Kota Yogyakarta mengikuti sidang paripurna.

YOGYA (KR) - Beban legislasi anggota DPRD Kota Yogyakarta terpilih hasil Pemilu 2024 dipastikan akan lebih ringan. Terutama setelah resmi dilantik sampai dengan kinerja akhir tahun ini. Hal ini lebih dari sepuh Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini sudah berhasil diselesaikan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta bahkan kembali membentuk panitia khusus (pansus) di sisa akhir masa jabatan dewan 2019-2024. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menjelaskan total ada tiga pansus yang berhasil ditetapkan pada Senin (3/6) kemarin. Pihaknya bertekad, sebelum pelantikan anggota dewan yang baru seluruh kinerja pansus tersebut sudah bisa diselesaikan. "Supaya beban legislasi bagi anggota dewan yang baru nanti bisa lebih ringan mengingat sisa waktu efektif sampai akhir tahun juga lebih terbatas," jelasnya, Selasa (4/6). Ketiga pansus yang dibentuk dalam sidang paripurna kemarin lusa, masing-masing akan membahas raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Dua raperda di awal merupakan produk hukum inisiatif eksekutif dan raperda terakhir

hasil usulan dewan yakni dari Komisi A. Widodo menambahkan, anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029 sesuai rencana akan dilantik pada 12 Agustus 2024. Sehingga sisa waktu efektif untuk melakukan pembahasan tiga produk hukum kali ini ialah dua setengah bulan. Pihaknya sangat optimis waktu yang tersedia mampu dilakukan secara optimal untuk melakukan pembahasan. "Semua sudah sepakat pansus yang dibentuk kemarin harus sudah selesai sebelum pelantikan dewan baru. Supaya tidak ada pekerjaan tertunda yang dilimpahkan," tandasnya. Total Propemperda 2024 mencapai 14 produk hukum. Masing-masing terdiri dari sembilan raperda yang diajukan oleh eksekutif, tiga raperda urusan wajib, dan dua raperda inisiatif dari kalangan dewan. Jumlah target produk hukum itu pun sama dengan tahun 2023 lalu. Sesuai ketentuan, ketika Propemperda bisa dituntaskan 100 persen maka untuk target tahun depan bisa ditambah hingga 25 persen. Dengan begitu tahun ini DPRD Kota Yogyakarta sebetulnya bisa membahas hingga 17 produk hukum. Akan tetapi Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta tetap menargetkan 14 Propemperda lantaran mempertimbangkan berbagai aspek.

Salah satu aspeknya ialah menyangkut alat kelengkapan dewan yang akan menjalankan fungsi legislasi. Pasalnya, setiap pergantian periodisasi dewan maka dibutuhkan waktu untuk membentuk alat kelengkapan. Dalam proses pembentukannya kerap diwarnai dengan dinamika politik sehingga perlu ada antisipasi. "Misal nanti dilantik 12 Agustus 2024, tidak bisa langsung melakukan pembahasan raperda sebelum alat kelengkapan terbentuk. Semoga nanti tidak sampai satu bulan semua alat kelengkapan sudah bisa ditetapkan," ungkapnya. Sesuai pengalaman, setiap produk hukum setidaknya membutuhkan waktu paling lama sampai tiga bulan pembahasan oleh tim pansus. Ketika anggota dewan baru sudah berhasil menempati pos alat kelengkapan pada akhir Agustus maka tersisa empat bulan kinerja legislasi yang dapat dijalankan. Sisa Propemperda 2024 pada akhir tahun ini pun hanya empat produk hukum. Dengan begitu kinerja legislasi sampai akhir tahun akan lebih ringan. Di samping itu, capaian kinerja legislasi pada tahun ini juga menjadi

evaluasi dan pertimbangan untuk menetapkan Propemperda tahun 2025. Target pembahasan produk hukum pada tahun depan harus sudah ditetapkan sebelum RAPBD 2025 diketok. Oleh karena itu, ketika Propemperda 2024 sudah bisa dituntaskan 100 persen maka target di tahun depan bisa ditambah hingga 17 produk atau minimal sama dengan tahun ini. Semakin banyak produk hukum yang dapat diselesaikan maka kepentingan pembangunan di Kota Yogyakarta juga akan semakin terlegitimasi lantaran setiap aspeknya ada payung hukum yang menaungi. Sesuai ketugasannya dalam menjalankan fungsi legislasi, Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen untuk bisa memperbanyak produk hukum yang ditetapkan. Baik berupa pencabutan perda yang sudah usang atau tidak sesuai aturan di atasnya, penyesuaian aturan pada kondisi masa kini, maupun membentuk produk hukum baru yang mendesak sesuai kebutuhan. "Adanya undang-undang baru yang berkaitan dengan tatanan pemerintahan maupun sistem di masyarakat, tentunya perlu ditindaklanjuti juga dengan perda. Ini yang kami sesuaikan dengan mendasarkan skala prioritas," katanya. **(Dhi)-f**



Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta membacakan penetapan pansus.



Pj Walikota (kiri) menghadiri sidang paripurna.